

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Haris. 2005. *Sengketa Tanah dan Urgensi Peradilan Agraria*..Suara Karya.
- Adrian Sutedi. 2015. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Akur Nurasa dan Dian Aries Mujiburohman. 2020. *Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah*. Edisi 1. Yogyakarta : STPN Press.
- A. P. Parlindungan. 1999. *Pendaftaran Tanah Di Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997)*. Bandung: Mandar Maju.
- Arie S. Hutagalung. 2005. *Perlindungan Pemilikan Tanah Dari Sengketa Menurut Hukum Tanah Nasional dalam Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Jakarta; Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.
- Ateng Syarifudin. 1994. *Kepala Daerah*. Cet. Pertama. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Bachtiar Effendy. 1993. *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- Boedi Harsono. 2005. *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan.
- Danrivanto Budhijanto. 2014. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta : Laksbang Pressindo.

- Edmon Makarim. 2013. *Buku Seri Hukum Telematika: Notaris dan Transaksi Elektronik*. Edisi Kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Effendi Perangin. 1990. *Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Erna Sri Wibawanti dan R.Mujiyanto. 2013. *Hak Atas Tanah Dan Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Faried Ali. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heteronom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama.
- FX Sumarja. *Hukum Pendaftaran Tanah*. 2010. Penerbit Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Idup Suhady. 2009. *Kepemerintahan yang Baik*, Modul Diklat Prajabatan Gol. I dan II. Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel)*. Yogyakarta: Topoffset.
- Jayadi Setiabudi. 2015. *Pedoman Pengurusan Surat Tanah Dan Rumah Beserta Perizinannya*. Jakarta: Buku Pintar.
- J.P. Chaplin. 2004. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: Raja Grafindo. Penerj, Kartini Kartono, Cet. IX.
- Malian, S. 2021. *Kebijakan Publik dalam Negara Hukum*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Marida Farida Indrati Soeprapto. *Imu Perundang-Undangan : Dasar-Dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta : Kanisius.
- Mertokusumo Sudikno. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mhd Yamin Lubis dan Abd Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*, Bandung : Mandar Maju.

- Mochtar Kusumaatmadja. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bandung: PT. Alumni.
- Murad. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*. Bandung; Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. 2006. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : Media Group.
- Pierre Legrand. 1996. *European Legal Systems Are Not Converging*. 45 *Int'l & Comp. L.Q.* 55. Dalam Danrivanto Budhijanto.
- Philipus M Hadjon. 2011. *Pengantar Hukum Administasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pres. Hal. 245-246.
- Samun Ismaya. 2013. *Hukum Administrasi Pertanahan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Santoso Urip, *Hukum Agraris: Kajian Komprehensif*, Cetakan I, Kencana, Jakarta, 2012. hlm. 319.
- Shidarta. 2010. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung : PT. Revika Aditama.
- Sidharta Arief. 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Simpson, S. Rostow. 1981. *Land Law and Registration*. Canbridge University of London terjemahan. Departemen Dalam Negeri.
- Sudikno Mertokusumo. 2008. *Hukum dan Politik Agraria*. Universitas Terbuka. Jakarta : Karunika.

Sumarto. 2012. *Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan dengan Prinsip Win-Win Solution Oleh BPN RI*. Makalah. Jakarta.

Urip Santoso. 2021. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Jakarta : Kencana.

Westi Utami. 2021. *Buku Pengadaan Tanah Di Indonesia Dan Beberapa Negara*. Yogyakarta: STPN PRESS.

Yamin Lubis. 2012. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung : Mandar Maju.

JURNAL

Andari dan Dian Aries Mujiburohman. 2023. Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Jurnal Aspek Hukum, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*. Yogyakarta.

Akhmad. 2022. *Analisa Yuridis Ketidak Sesuaian Antara Salinan Buku Tanah Dengan Buku Tanah Pada Data Yuridis Pertanahan Di Kantor Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional*. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*. Volume 6 Nomor 2.

Angeline Lee. 2001. *Convergence in Telecom, Broadcasting and it: A Comparative Analysis of Regulatory Approaches in Malaysia, Hong Kong and Singapore*. *Singapore Journal of International and Comparative Law*.

Anindhita, B. 2021. *Perbandingan Sistem Publikasi Positif dan Negatif Pendaftaran Tanah: Perspektif Kepastian Hukum*. *Amanna Gappa*. Volume 29 Nomor 2.

Djulaeka dan Ridho Jusmadi. 2013. *Konvergensi Telematika, Arah Kebijakan dan Pengaturannya Dalam Tata Hukum Indonesia*. *Jurnal Yustisia*. Volume 2 Nomor 3.

Enny Agustina. 2021. *Kajian Yuridis Program Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Elektronik*. *Jurnal Solusi*. Volume 19 Nomor 3.

- Edmon Makarim. 2015. *Keautentikan Dokumen Publik Elektronik Dalam Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Volume 1 Nomor 4.
- Florianus SP. 2007. *Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah*. Jakarta: Visimedia.
- Jennifer G. Hill. 2015. *The Persistent Debate about Convergence in Comparative Corporate Governance*. Sydney L. Rev.
- Josua Sitompul. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw, Tatanusa*. Jakarta.
- Joshua P Nugraha, dkk. *Penerapan Blockchain untuk Pencegahan Sertipikat Tanah Ganda di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional*. Jurnal Widya Bhumi. Volume 2 Nomor 2.
- Khairina. 2013. *Sertifikat cacat hukum dalam hukum pertanahan di Indonesia*. JURIS. Volume 13 Nomor 1.
- Lee A. Bygrave. 2014. *Data Privacy Law An International Perspectives*. Oxford University Press. UK: Oxford. Hal. 1. Dalam Sinta Dewi Rosadi. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional. Regional dan Nasional*. Refika Aditama. Bandung. Hal. 125.
- Lestario, A. 2022. *Sistem Pendaftaran Tanah yang memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak atas Tanah di Indonesia*. Volume 1 Nomor 1.
- Mujiburohman, D. A. 2018. *Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan. Volume 4 Nomor 1.

- Patittingi, Farida. 2020. *New Paradigm in Natural Resources Management: Securing Indigenous Peoples Rights*. Hasanuddin Law Review 6. Nomor 1.
- Surti Ramadhani dan Mutiara Hikmah. 2020. *Keabsahan Dokumen Fisik Sertipikat Hak Atas Tanah Terhadap Peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Layanan Berbasis Online*. Jurnal Pamulang Law Review. Vol. 5, Issue 1, Agustus 2022
- Syofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. *Prinsip Keabsahan (Rechtmatigheid) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*. Jurnal Cita Hukum. Volume 5 Nomor 2.
- Supriadi. 2015. Hukum Agraria. Edisi 1. Cetakan 6. Sinar Grafika. Jakarta.
- Widayani. 1960. *Kepastian Hukum Sistem Publikasi dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia Menurut UU RI Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, 2019*. Jurnal Hukum to-ra Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat. Volume 1 Nomor 3.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Siaran Pers Hm.4.6/190/Set.M.Ekon.3/05/2024. Jakarta 29 Mei 2024
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Surat Edaran Nomor 12/SE-HR.02/IX/2024 Tentang Percepatan Pelaksanaan Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur Serta Larangan Penerimaan Permohonan Layanan Pertanahan Melalui Loker Non Resmi Dalam Rangka Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur.

Surat Edaran Nomor 12/SE-HR.02/IX/2024 Tentang Percepatan Pelaksanaan Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur Serta Larangan Penerimaan Permohonan Layanan Pertanahan Melalui Loker Non Resmi Dalam Rangka Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur.

Surat Edaran Nomor 12/SE-HR.02/IX/2024 Tentang Percepatan Pelaksanaan Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur Serta Larangan Penerimaan Permohonan Layanan Pertanahan Melalui Loker Non Resmi Dalam Rangka Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur.

Surat Edaran Nomor 12/SE-HR.02/IX/2024 Tentang Percepatan Pelaksanaan Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur Serta Larangan Penerimaan Permohonan Layanan Pertanahan Melalui Loker Non Resmi Dalam Rangka Alih Media Buku Tanah Dan Surat Ukur.

Lampiran Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang – Undang Administrasi Pemerintahan

WEBSITE

Ady Thea DA, "6 Kritik KPA untuk Kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik",
<https://www.hukumonline.com/berita/a/6-kritik-kpa-untuk-kebijakan-sertipikat-tanah-elektronik-lt601d3bfeb8060/?page=all>

BBC, "Sertifikat tanah elektronik: Bagaimana penerapan, keamanan, dan sanksi terhadap yang menolak?",
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55907277>,

<https://nurulsazwaniblog.wordpress.com/2016/12/21/teori-teori-pendidikan-emperismenativismekonvergensi/>, diakses pada tanggal 23 Juli 2024 Pukul 13.00 WITA.

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/4198/2.pdf;sequence=1> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024, Pukul. 13.00

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupayakan-konvergensi-regulasi-siber-di-tanah-air-lt5f1506d7ef958/> diakses pada tanggal 26 Oktober 2024, pukul 10.00

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ingatkan-pentingnya-konvergensi-tatanan-hukum-lt4ba83cc6288d2/?page=all> diakses pada tanggal 26 Oktober 2024, pukul 10.00

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-asas-hukum--ilex-superior-i--ilex-specialis-i--dan-ilex-posterior-i-beserta-contohnya-cl6806/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2024, pukul 11.00

<https://jateng.antaranews.com/berita/197257/bekas-kepala-bpn-kota-semarang-divonis-5-tahun-penjara>

<https://www.liputan6.com/news/read/5218871/pt-dki-jakarta-nyatakan-eks-kepala-bpn-dki-tetap-divonis-35-tahun-terkait-kasus-tanah-di-cakung>

<https://www.liputan6.com/regional/read/5386500/hakim-wajibkan-eks-kepala-bpn-riau-kembalikan-uang-rp21-miliar-hasil-korupsi?page=2>

<https://malangposcomedia.id/kasus-mafia-tanah-di-kota-batu-dilimpahkan-ke-pn/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/akta-notaris-sebagai-akta-otentik-lt550c0a7450a04/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengupayakan-konvergensi-regulasi-siber-di-tanah-air-lt5f1506d7ef958/>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/akademisi-ingatkan-pentingnya-konvergensi-tatanan-hukum-lt4ba83cc6288d2/?page=all>

<https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/dinamika-konvergensi-hukum-telematika-dalam-sistem-hukum-nasional>

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/11/kominfo-gerak-cepat-tangani-lima-kasus-baru-kebocoran-data/>

<https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/51640/t/javascript;>

<https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/pembobolan-pusat-data-nasional-pembelajaran-pemerintah-dalam-penguatan-keamanan-perlindungan-data-nasional/>

Iam Waqas, “Risks of Using QR Codes and How To Mitigate it – Not As Safe as You Think”, <https://www.komputer.org/publications/tech-news/trends/qr-code-risks>

Naufal Ridhwan, “Serba-Serbi Ancaman Phishing Kode QR, Pakar Siber Beberkan Risiko hingga Cara Main Pelaku”, https://bisnis.tempo.co/read/1714068/serba-serbi-ancaman-phishingkode-qr-pakar-siber-beberkan-risiko-hingga-cara-main-pelaku?page_num=1

Web atr.bpn.go.id

DATA TAMBAHAN

LAMPIRAN